



Pemkot Usulkan Dintib jadi Kantor Satpol PP

YOGYA, TRIBUN - Terkait perombakan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), Pemerintah Kota Yogyakarta telah menentukan usulan perombakan. Skala prioritas ini berdasarkan undang-undang dan juga pertimbangan beban kerja yang sudah tidak sesuai.

Kepala Bagian Organisasi Kota Yogyakarta, Kris Sarjono Sutejo, mengatakan, SKPD yang mendesak untuk segera dirombak antara lain Dinas Ketertiban yang ada diubah menjadi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Kemudian, juga diusulkan pemisahan Dinas Kebudayaan dan Kantor Pariwisata, serta Dinas Perizinan yang akan ditambahkan tugas baru yang berkaitan dengan penanaman modal. "Sehingga nantinya akan berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan," kata Kris.

Selain itu, juga dilakukan pembentukan Badan Komunikasi dan Informasi yang merupakan penggabungan Bagian Humas dan Teknologi Informasi, pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat

Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

"Kami juga akan menambah tenaga profesional di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). Karena selama ini urusan pajak hanya ditangani oleh pegawai negeri sipil yang tidak memiliki pengetahuan menyeluruh soal pajak. Jadi dirasa perlu tenaga profesional yang memang benar-benar memahami pajak," kata Kris, Selasa (21/4).

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta (BPBD) yang juga direncanakan dilakukan perombakan yaitu pemisahan BPBD dan pembentukan Kantor Penanggulangan Kebakaran dan Kedaruratan Terpadu, akan ditunda terlebih dahulu.

"Perombakan tersebut belum perlu dilakukan, sehingga BPBD tidak akan diutak-atik terlebih dahulu," ujar dia.

Perombakan SOTK ini ditargetkan bisa selesai pada akhir tahun ini, sehingga pelaksanaannya bisa segera dilakukan pada tahun depan. Terlebih, anggaran pun sudah di-

siapkan Pemerintah Kota Yogyakarta pada APBD Perubahan 2015 terkait rencana tersebut.

Terkait dengan jumlah SDM, Kris menilai belum diperlukan untuk melakukan penambahan. Kalau pun ada SDM yang ditambah, maka akan ada SDM di organisasi lain yang akan dikurangi. Sehingga bisa dilakukan pemerataan.

"Kalau yang tidak krusial biasanya hanya perubahan nomenklatur saja. Seperti misalnya perubahan dinas menjadi kantor atau badan. Kalau seperti itu kan urusannya tetap, hanya berubah di nomenklatur," jelas Kris.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Agusnur mengatakan perombakan organisasi di Pemkot Yogyakarta perlu dilakukan. Sebab sudah delapan tahun Pemkot Yogyakarta tidak melakukan perombakan organisasi.

"Tapi harus ada kajian-kajian agar perubahan SOTK sesuai dengan aturan dan regulasi. Kami meminta Bagian Organisasi untuk bisa lebih mengkerucutkan sesuai dengan kepentingan," tandasnya. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005